



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	15 Maret 2024	Media	Mingguan Sumbar Pos
Kategori	PENDIDIKAN	Jurnalis	anasrul





PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	15 Maret 2024	Media	Mingguan Sumbar Pos
Kategori	PEMERINTAHAN	Jurnalis	anasrul

Mingguan Sumbar Post

KLIPING KORAN

EDISI : 747 1Th.XV
TANGGAL : 15-21 maret 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pj Wali Kota Pariaman serahkan LKPD Kota Pariaman ke BPK RI

Liputan: Andi Yones (Kabiro Bikas Padang Pariaman/Sumbar)

Pariaman - Pj Walikota Pariaman Roberia serahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Pariaman tahun 2023 un Audited, kepada Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus di Ruang Rapat Lantai III Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, Kamis (7/3/2024).

Dirinya menuturkan bahwa pengisian LKPD ini, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga Kota Pariaman bisa kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, Kota Pariaman sudah mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali, dan 8 tahun secara beruntun, tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemko Pariaman, dan kita berharap LKPD Tahun 2023 ini juga berhasil meraih Opini

WTP nantinya," ujarnya yang didampingi oleh Inspektur Kota Pariaman, Alfian Harun, Kepala BPKPD, Buyung Lapau serta Kabid.

Roberia menyebutkan LKPD un Audited yang diserahkan ke BPK ini, menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, baik kepada masyarakat maupun BPK, sehingga

kegiatan yang kita gunakan dengan menggunakan uang negara, dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka," ungkapnya.

Lebih lanjut Direktur di Kementerian Hukum dan HAM RI ini menegaskan bahwa Kota Pariaman telah menjadi pemerintah yang good government dan clean government, dimana hal ini terbukti dengan selalu diterimanya opini WTP oleh Pemko Pariaman, ulasanya.

